KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 19 Februari 2020

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 6	Rabu, 19 Februari 2020	107 Proyek Jateng Masuk RPJMN	Sebanyak 107 proyek yang bakal dibangun di Jawa Tengah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengungkapkan bahwa 107 proyek itu hasil dari konsultasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pusat.
2	Bisnis Indonesia Halaman 20	Rabu, 19 Februari 2020	Penggunaan Sikasep Terkendala	Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tak segera habis seperti yang dikhawatirkan pengembang. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain.
3	Bisnis Indonesia Halaman 21	Rabu, 19 Februari 2020	Target Setara 56% Capaian 2016-2019	Jumlah proyek strategis nasional (PNS) yang ditargetkan sebanyak 52 unit tahun ini setara dengan 56,52% dibandingkan dengan capaian PNS yang berhasil diselesaikan pada periode 2016-2019 sebanyak 92 proyek.
4	Media Indonesia Halaman 10	Rabu, 19 Februari 2020	Jalur Pucak II Mendesak	Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, berharap pembangunan jalur Puncak II yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dan Cianjur dipercepat. Selain beban jalur lama semakin berat sehingga kerap terjadi kemacetan lalu lintas, di jalur itu juga sering terjadi bencana

Judul	**107 Proyek Jateng Masuk RPJMN**	Tanggal	Rabu, 19 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 6		
Resume	Sebanyak 107 proyek yang bakal dibangun di Jawa Tengah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengungkapkan bahwa 107 proyek itu hasil dari konsultasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pusat.		

| PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI |

107 Proyek Jateng Masuk RPJMN

Bisnis, SEMARANG — Sebanyak 107 proyek yang bakal dibangun di Jawa Tengah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengungkapkan bahwa 107 proyek itu hasil dari konsultasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pusat.

"Itu kami bahas ketiga pertemuan dengan pemerintah 3 minggu yang lalu," kata Prasetyo kepada *Bisnis*, Selasa (18/2).

Prasetyo menjelaskan bahwa 107 proyek tersebut sudah masuk dalam lampiran RPJMN 2020—2024. Perkembangan terbaru, ratusan proyek di Jateng itu telah disepakati dan masuk dalam rencana kerja (renja) kementerian dan lembaga.

"Jadi, kementerian dan lembaga sudah memasukan itu [107 proyek] ke renja mereka masing-masing," jelasnya.

Jateng sendiri ketiban untung dengan rencana pembangunan ratusan proyek yang didominasi infrastruktur dasar. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2019, sekitar 270 proyek senilai Rp353,4 triliun bakal menyebar ke penjuru Jawa Tengah dalam waktu 5 tahun ke depan.

Rencana pelaksanaan proyek tersebut menjadi strategi pemerintah guna mempercepat roda perekonomian Jateng. Apalagi, Jateng merupakan salah satu provinsi yang ditarget mampu tumbuh di angka 7%.

BENDUNGAN JRAGUNG

Sementara itu, dalam perkembangan lain, proses pengadaan lahan untuk pembangunan Bendungan Jragung akan disesuaikan dengan standar harga yang ada di dua desa terdampak.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku telah menerjunkan tim dari Pemprov Jateng untuk berkomunikasi dengan warga terkait dengan pengadaan lahan tersebut. Pihaknya ingin memastikan dalam proses pembebasan lahan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Saya telah meminta tim dari Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait untuk duduk *bareng* supaya masyarakat mendapatkan informasi yang baik," kata Ganjar kepada *Bisnis*, Senin (17/2).

Ganjar tak memungkiri bahwa Jawa Tengah memiliki catatan khusus dalam proses pembebasan lahan. Namun, tak sedikit pula proyek-proyek atau pembebasan lahan berhasil diselesaikan tanpa harus ada sengketa yang berkepanjangan.

Menurut Ganjar, rata-rata ketidaksepakatan antara pemerintah dan warga adalah masalah harga lahan yang akan dibebaskan. Namun, jika sejak awal ada komunikasi yang cukup baik, proses pembebasan lahan bisa berjalan tanpa hambatan. "Ini kan terjadi di beberapa tempat, sejak dari dulu."

Sebelumnya, dua desa di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang bakal terdampak pembangunan Bendungan Jragung yang saat ini masuk dalam tahap pengadaan lahan.

Dalam pengumuman No. 590/0003142 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang, pemerintah membutuhkan lahan seluas 624,1 hektare di dua desa tersebut.

"Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendungan Jragung seluas 625,1 hektare," tulis Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah yang dikutip *Bisnis*, Senin (17/2).

Adapun, pemerintah melalui pengumuman tersebut mengungkapkan tiga tujuan pembangunan bendungan tersebut.

Pertama, untuk menyediakan tampungan air guna melayani kebutuhan ketersediaan sumber air di wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang.

Kedua, untuk memenuhi kebutuhan irigasi di Daerah Irigasi Jragung Kabupaten Semarang dan tambahan pasokan air baku untuk Kabupaten Demak dan Kabupaten Demak.

Ketiga, pembangunan Bendungan Jragung dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan data Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Bendungan Jragung dirancang dengan kapasitas tampung sebanyak 103 juta meter kubik pada saat normal dan 135,43 juta meter kubik saat kondisi banjir. Bendungan ini akan menjadi sumber irigasi bagi 6.435 hektare lahan pertanian di Demak dan sekitarnya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Bendungan Jragung merupakan salah satu bendungan dalam proyek pembangunan 65 bendungan yang dicanangkan pada 2015. Hingga 2018, sebanyak 56 bendungan sudah masuk tahap konstruksi dengan 15 bendungan sudah rampung.

(Edi Suwiknyo)

Judul	**Penggunaan Sikasep Terkendala**	Tanggal	Rabu, 19 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 20		
Resume	Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tak segera habis seperti yang dikhawatirkan pengembang. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain.		

| FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN |

Penggunaan SiKasep Terkendala

Bisnis, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tak segera habis seperti yang dikhawatirkan pengembang. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan sebetulnya masih banyak kendala yang dialami, baik pembeli maupun pengembang dalam penggunaan aplikasi Sistem KPR Sejahtera FLPP (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

"Kita berulang kali minta dilaksanakan transisi, karena sebetulnya sistemnya belum kuat, tapi dipaksakan jalan jadi banyak kendala," ujarnya pada Selasa (18/2).

Salah satu kendala yang menyulitkan adalah jika terjadi kesalahan pengisian data, pengguna kesulitan mengoreksi data dan hanya bisa dikoreksi lewat saluran telepon. Belum lagi, layanan teleponnya belum bisa melayani 24 jam.

"Jadi, masih ada *bottleneck*. Artinya, kalau memang bisa ditransisikan, yang belum terdaftar SiKasep dan Sikumbang tetap diakadkan. Tapi, yang belum terdaftar itu uangnya ditahan dulu, daripada tak bisa akad," ungkapnya.

Menurutnya, dengan pelaksanaan wajib menggunakan sistem tanpa transisi, selain membuat pengembang dan konsumen kelabakan, juga membuat jumlah pengguna sistem membeludak pada waktu yang bersamaan, apalagi untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, sampai Sabtu (15/2), sistem SiKasep mencatat realisasi FLPP baru mencapai 414 unit dari 81.080 pemohon. Kebanyakan pemohon FLPP masih dalam proses subsidi *checking* dan verifikasi oleh bank.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan hal senada. Saat ini yang terjadi di lapangan adalah rumah sudah 100% dibangun, konsumen sudah siap, tapi tidak bisa akad FLPP.

"Ini karena kami merasa masih banyak kerumitan dalam mengisi SiKasep dan SiKumbang. Masalahnya apakah PPDPP [Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan] mau menekan jumlah realisasi atau mau membantu masyarakat yang butuh rumah subsidi?" katanya. *(Mutiara Nabila)*

Judul	**Target Setara 56% Capaian 2016-2019**	Tanggal	Rabu, 19 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Jumlah proyek strategis nasional (PNS) yang ditargetkan sebanyak 52 unit tahun ini setara dengan 56,52% dibandingkan dengan capaian PNS yang berhasil diselesaikan pada periode 2016-2019 sebanyak 92 proyek.		

| PROYEK STRATEGIS NASIONAL 2020 |

TARGET SETARA 56% CAPAIAN 2016–2019

Bisnis, JAKARTA — Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menargetkan 52 proyek strategis nasional dengan nilai investasi Rp334 triliun selesai dibangun pada tahun ini.

Agne Yasa

Jumlah proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan sebanyak 52 unit tahun ini setara dengan 56,52% dibandingkan dengan capaian PSN yang berhasil diselesaikan pada periode 2016—2019 sebanyak 92 proyek.

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan bahwa terdapat 52 proyek yang diharapkan selesai pada 2020 dengan perincian 12 proyek beroperasi sebagian, 32 konstruksi akan selesai 2020, dan delapan konstruksi akan beroperasi.

"Nilai investasi Rp334 triliun terdiri atas 76% berasal dari swasta, 5% BUMN, dan 19% APBN," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (18/2).

Adapun, perincian dari 52 proyek tersebut yaitu terdiri atas proyek kereta, pelabuhan, bendungan, irigasi, tanggul laut, jalan, bandar udara, air bersih dan sanitasi, energi, serta kawasan.

Keseluruhan proyek tersebut sudah dalam status tahap konstruksi per Desember 2019. Beberapa proyek ditargetkan mulai beroperasi di antaranya Bandara Internasional di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai investasi Rp5,20 triliun, Makassar New Port dengan nilai investasi Rp1,89 triliun, jalan tol Pandaan—Malang (37,62 km) dengan nilai investasi Rp5,97 triliun, dan jalan tol Manado—Bitung (39 km) dengan nilai investasi Rp5,12 triliun.

Secara kumulatif, mulai dari 2016 sampai dengan Desember 2019 terdapat 92 PSN yang selesai dibangun dengan nilai investasi Rp467,40 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan 52 proyek untuk dimasukkan dalam PSN, tahun ini.

"Ada usulan 52 proyek PUPR masuk PSN. Perinciannya, 30 proyek Cipta Karya, 7 proyek Bina Marga, 14 proyek SDA [Sumber Daya Air] dan 1 proyek Perumahan," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga kepada *Bisnis*.

PEMBEBASAN LAHAN

Selain itu, KPPIP mencatat bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam beberapa proyek infrastruktur, tetapi situasinya sudah jauh lebih baik.

Hal ini terbukti dengan selesainya jalan tol sepanjang 1.233 km, 15 Bendungan PSN yang telah terbangun, dan proyek PSN lainnya yang selesai lebih cepat.

Selain itu, kata Wahyu, terdapat 208 usulan PSN baru dan masih dalam proses *screening*.

"Dengan kriteria operasional yaitu nilai investasi proyek minimal Rp500 miliar," katanya.

Dari usulan PSN sebanyak itu, ujar Wahyu, belum ada usulan terkait dengan proyek ibu kota negara (IKN) baru hingga saat ini. Namun, KPPIP mempertimbangkan untuk mengusulkan kepada Presiden agar proyek IKN dimasukkan dalam lampiran PSN.

"Terdapat beberapa usulan PSN yang secara tidak langsung mendukung rencana proyek IKN seperti proyek jalan, bendungan, dan jaringan irigasi," ujarnya.

Lebih lanjut, jelasnya, KPPIP mendorong supaya penyelesaian seluruh PSN hingga 2024 dengan melakukan upaya pemantauan dan evaluasi hingga upaya mengatasi penyumbatan (*debottlenecking*) secara menyeluruh ke seluruh PSN. *(Aprianus Doni T.)*

> **Nilai investasi Rp334 triliun terdiri atas 76% berasal dari swasta, 5% BUMN, dan 19% APBN.**

FLUKTUATIF, TETAPI PASTI

Penyelesaian proyek strategis nasional sejak 2016 sampai dengan 2019 cenderung berfluktuatif. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas mencatat secara keseluruhan terdapat 92 PSN yang selesai dengan nilai investasi Rp467,52 triliun selama periode tersebut. Berikut ini perinciannya:

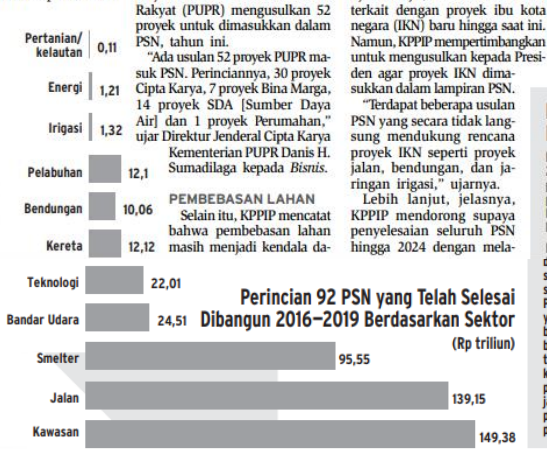

Perincian 92 PSN yang Telah Selesai Dibangun 2016–2019 Berdasarkan Sektor
(Rp triliun)

Pembebasan Lahan Masih Menjadi Isu Sentral

KPPIP mencatat bahwa sampai dengan Desember 2019, terdapat 189 isu yang dilaporkan dalam penyediaan 223 proyek dan 3 program, dengan isu perencanaan dan penyiapan 26%, isu pembebasan lahan 31%, isu pendanaan 13%, isu pelaksanaan konstruksi 17%, dan isu perizinan 13%.

Pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam dederapa proyek infrastruktur, tetapi situasinya sudah jauh lebih baik. Hal ini terbukti dengan selesainya jalan tol sepanjang 1.233 km, 15 Bendungan PSN yang telah terbangun, dan proyek PSN lainnya yang selesai lebih cepat. Kendala yang dihadapi biasanya dalam masalah penyiapan rencana pembebasan lahan dari kementerian terkait yang membutuhkan lahan tersebut dan kapasitas dari pegawai di kantor BPN setempat mengingat banyaknya program-program pertanahan yang juga jadi tanggung jawab mereka dalam penyediaan lahan seperti adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), program reforma agraria lainnya.

Sumber: KPPIP, Feb. 2020 BISNIS/HUSIN PARAPAT

2016, terdapat 20 proyek selesai dengan nilai investasi Rp33,3 triliun, terdiri atas 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, 1 jalur pipa gas, dan 4 pos lintas batas Negara (PLBN).

2017, terdapat 10 proyek selesai dengan nilai investasi Rp61,4 triliun, terdiri atas 2 jalan tol, 1 jalan akses, 1 bandara, 1 fasilitas gas, 3 PLBN, 1 bendungan, 1 saluran irigasi.

2018, terdapat 32 proyek selesai dengan nilai investasi Rp207,4 triliun, terdiri atas 2 kereta api, 4 bendungan, 1 irigasi, 10 jalan tol, 5 kawasan ekonomi eksklusif, 1 bandara, 4 kawasan industri, 4 smelter, dan 1 sentra kelautan perikanan.

2019 terdapat 30 proyek selesai dengan nilai investasi Rp165,3 triliun, terdiri atas 4 bandara, 4 bendungan, 9 jalan, 6 kawasan, 2 kereta api, 1 pelabuhan, 2 smelter, dan 2 teknologi.

Judul	**Jalur Pucak II Mendesak**	Tanggal	Rabu, 19 Februari 2020
Media	Media Indonesia Halaman 10		
Resume	Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, berharap pembangunan jalur Puncak II yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dan Cianjur dipercepat. Selain beban jalur lama semakin berat sehingga kerap terjadi kemacetan lalu lintas, di jalur itu juga sering terjadi bencana		

JAWA BARAT

Jalur Puncak II Mendesak

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, berharap pembangunan jalur Puncak II yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dan Cianjur dipercepat. Selain beban jalur lama semakin berat sehingga kerap terjadi kemacetan lalu lintas, di jalur itu juga sering terjadi bencana.

"Volume kendaraan di jalur Puncak sudah berat dan di wilayah itu juga sering terjadi bencana. Maka perlu ada alternatif ruas jalan, yakni Puncak II, dan pembangunannya perlu dipercepat," kata Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, Yedi Indraguna, kemarin.

Ia menjelaskan *detail engineering design* (DED) jalur Puncak II saat ini masih terus digarap sebelum berlangsung pekerjaan konstruksi. Tahapan itu dilakukan sebagai perencanaan memetakan titik-titik jalur alternatif seandainya nanti jalur Puncak II terealisasi.

Menurut Yedi, total panjang jalur Puncak II dari Bogor hingga Cianjur mencapai 40 kilometer (km). Akan tetapi, megaproyek jalur Puncak II yang berada di wilayah Cianjur hanya sekitar 8 km.

"Progresnya masih dalam tahap DED. Masih dalam tahap perencaaan-perencanaan. Beberapa pekan lalu, tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cianjur agak detail melakukan survei ke lokasi. Kami sudah membuat beberapa alternatif," ujar Yedi.

Ia juga mengungkapkan total biaya pembangunan jalur Puncak II sekitar Rp587 miliar. Saat ini Pemkab Cianjur telah menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk pembangunan *existing* jalan. Adapun selebihnya didanai pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pembangunan fisik (jalur Puncak II) akan minta bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi. Proyek jalur ini kan lintas wilayah dengan Kabupaten Bogor. Kami berharap untuk biaya konstruksinya dari pemerintah pusat dan dana pembebasan lahan masyarakat dari pemerintah provinsi," tuturnya.

Jalur tersebut rencananya akan dibangun selebar 30 meter. Di wilayah Cianjur jalur Puncak II terbentang dari Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, hingga ke Jembatan Cibeet yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, saat berlangsung Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) Gubernur Jawa Barat dengan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Pelaksana Tugas Bupati Cianjur Herman Suherman juga berharap percepatan pembangunan jalur Puncak II menjadi prioritas.

Jalan layang

Pembangunan infrastruktur di wilayah lain di Indonesia juga terus berlangsung. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meresmikan jalan layang ruas Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau dengan panjang 3 kilometer dan lebar 9 meter.

"Pembangunan jalan layang yang dilaksanakan secara *multiyears*, yakni tiga tahun, tetapi bisa kita selesaikan lebih cepat, yakni dua tahun," kata Sugianto, kemarin.

Dengan dibangunnya jalan layang yang menghubungkan tiga kabupaten dan akses menuju Provinsi Kalimantan Barat, ujarnya, lalu lintas barang kebutuhan masyarakat dan jasa menjadi lebih ekonomis sebab jalur tersebut mempersingkat waktu tempuh. (BB/SS/N-1)